

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Dalam studi hubungan internasional dewasa ini, perdebatan mengenai kekuasaan negara banyak mengundang perhatian di kalangan akademisi maupun para pengambil kebijakan negara. Seberapa besar kekuasaan negara di era globalisasi sekarang ini yang diikuti dengan semakin pluralnya aktor internasional dan perubahan politik internasional yang multipolar. Perubahan pola hubungan internasional tersebut semakin menyebarluaskan globalisasi yang identik dengan pengintegrasian ekonomi secara global.

Secara umum globalisasi adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial dan budaya yang melewati batas-batas internasional. Proses globalisasi mengarah pada interdependensi aktor internasional dalam sistem ekonomi global. Kaum neoliberal sebagai pendukung utama globalisasi berpikir optimis atas gejala tersebut, namun disisi lain beberapa pihak menilai globalisasi sebagai sebuah proses kemunduran bagi peran negara.

Globalisasi menuntut pembatasan peran negara yang sekecil-kecilnya, sehingga negara tidak lagi turut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem semacam ini lebih menawarkan kesempatan yang lebih besar, memberikan kemungkinan bagi kemajuan ekonomi. Dalam sistem global yang menyatu, pelaku ekonomi yang kecil, fleksibel, dapat tumbuh semakin kuat

kehilangan pengaruh dan kekuasaannya. Pergeseran kekuasaan negara dalam sistem global ini menjadi hal yang baru dan menarik untuk dikaji dalam ilmu hubungan internasional. Ditengah perdebatan sengit mengenai pergeseran kekuasaan negara dalam globalisasi, muncul Anthony Giddens sebagai salah satu pemikir kontemporer yang populer dengan karyanya *The Third Way*. Giddens sebagai pendukung globalisasi, memiliki beberapa pandangan yang berbeda dengan kaum neoliberal yang juga sebagai pendukung utama globalisasi. Sebagai sesama pendukung globalisasi, tentunya menarik untuk membandingkan pemikiran neoliberal dengan Anthony Giddens tentang pergeseran kekuasaan negara dalam globalisasi. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul **“Posisi Negara Dalam Neoliberalisme Menurut Anthony Giddens”**.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai perwujudan pemahaman teori-teori yang penulis terima dibangku kuliah terutama mengenai pemikiran yang berkembang dalam Studi Hubungan Internasional. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan membandingkan beberapa pemikiran dengan fenomena kontemporer dalam hubungan internasional. Secara khusus penelitian ini akan membahas tentang pergeseran kekuasaan negara dalam globalisasi dan membandingkan posisi negara menurut pemikiran neoliberalisme dengan Anthony Giddens sebagai salah satu pemikir besar dalam teori sosial kontemporer.

### C. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan indikator status akademis yang telah dicapai, Studi Hubungan Internasional (SHI) telah mencapai suatu taraf yang layak untuk disebut sebagai suatu disiplin ilmu. Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin ilmu telah dipenuhi oleh berbagai macam wacana dan teori yang berkembang di dalamnya. Perkembangan SHI tidak terlepas dari dinamika historis perkembangan sistem sosial dan politik dalam sebuah masyarakat hingga sampai pada tahap terbentuknya negara. Dalam hubungan internasional, negara merupakan aktor yang dominan dalam perkembangan hubungan internasional. Hal ini dikarenakan negara memiliki kemampuan dan legalitas yang diakui oleh masyarakat internasional untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sosial maupun militer yang melewati batas wilayah tertentu, seperti ekspor-impor senjata, mengirim diplomat dan sebagainya. Selain itu, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hal inilah yang menjadikan negara memiliki kekuasaan yang besar terhadap masyarakatnya, sehingga negara mempunyai wewenang dalam mengontrol kebijakan politik maupun ekonomi.

Kekuasaan yang dimiliki negara tersebut menjadi salah satu obyek perdebatan yang berkembang dalam SHI. Perdebatan yang berkembang dalam SHI tidak terlepas dari tiga pendekatan utama, yaitu tradisional, behavioralis dan pasca behavioralis. Sebelum Perang Dunia II, obyek SHI berwujud

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.

hubungan antara kelompok-kelompok yang berkuasa yang tinggal di tempat yang berbeda-beda telah menjadi bagian dari studi sejarah.<sup>2</sup> Dan terutama sesudah Perang Dunia I, studi dan pengajaran hubungan internasional memperoleh pengakuan sebagai bidang studi yang berdiri sendiri di Amerika Serikat dan Eropa.<sup>3</sup> Perdebatan pertama dalam SHI adalah pendekatan tradisional antara paradigma idealis berhadapan dengan realisme. Idealisme, sebagai sebuah paradigma klasik, adalah sebuah paradigma yang sangat mendominasi dan sangat berperan penting dalam kelahiran SHI. Masa setelah perang dunia pertama memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar bagi ilmuwan politik yang mempelajari hubungan-hubungan lintas batas negara/antar negara. Bagi kaum idealis, manusia pada dasarnya bersifat rasional, lebih memilih sebuah iklim yang harmonis. Perang hanyalah bentuk ketidakmampuan manusia (dalam hal ini tokoh-tokoh pengambil kebijakan dalam negara-negara tersebut) untuk mengambil sikap berdasarkan kalkulasi rasional. Saran yang diberikan kaum idealis adalah menegakkan Hukum-hukum internasional dan mendirikan Liga Bangsa-Bangsa.

Gagasan kaum idealis mendapatkan tantangan dari kaum realis. Realisme adalah paradigma yang asumsi pokoknya sangat berkaitan dengan kekuasaan. Bagi realisme, penegakan hukum internasional ataupun pendirian Liga Bangsa-Bangsa adalah sia-sia. Manusia digerakkan oleh naluri dasar untuk mencari kekuasaan (*Struggle for Power*). Segala upaya untuk menghindarkan manusia ataupun negara-negara untuk bertindak berdasarkan

naluri dasar tersebut sama saja dengan buang-buang tenaga. Realisme lebih menganggap bahwa sebenarnya kepentingan-kepentingan dari negara-negara yang terlibat dalam perebutan kekuasaan justru akan mengarah pada terjadinya perimbangan kekuasaan. Perimbangan kekuasaan itulah yang memungkinkan terciptanya stabilitas.

Perdebatan kedua adalah perdebatan yang lebih bersifat metodologis antara pendekatan *tradisional* dengan *behavioralis*. Yaitu tentang bagaimana metodologi yang tepat untuk memahami kekuasaan. Melalui metode tradisional seperti halnya kaum realis, atau melalui metode kuantitatif dengan penghitungan secara cermat mengenai atribut-atribut kekuasaan.

Perdebatan ketiga, adalah kemunculan kembali paradigma realis dan liberal-klasik (idealis) dalam format baru yang sudah termodifikasi. Realisme telah diperbaharui dengan kemunculan neorealisme R. Gilpin ataupun Kenneth Waltz. Sebaliknya, kaum idealis/liberal klasik telah digantikan oleh kaum neoliberal. Titik perdebatan mereka yang terkait dengan kekuasaan adalah mengenai porsi kekuasaan yang dimiliki oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional ditengah gerak maju perkembangan zaman. Kaum liberal kontemporer beranggapan bahwa kekuasaan negara telah dilucuti dengan semakin terbukanya perdagangan internasional dan kemunculan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Sebaliknya, kaum neorealis tetap menganggap bahwa kekuasaan bukanlah sebuah atribut bebas, melainkan selalu identik dengan negara yang merupakan aktor penting dalam hubungan internasional.

Dalam perdebatan ketiga tersebut, pemikiran neoliberal lebih banyak mendominasi wacana dalam SHI dan hubungan internasional secara langsung. Hal ini terlihat dari semakin kompleksnya aktor internasional selain negara setelah berakhirnya perang dingin yang menjadi “kemenangan” kapitalisme dan semakin meluasnya globalisasi sebagai agenda dari neoliberal.

Kapitalisme kekinian adalah kapitalisme yang mengarah ke bentuknya yang lain menjadi neoliberalisme, yang sebenarnya merupakan pengulangan kembali watak kapitalisme awal klasik yang sebelumnya strategi reformasi kapitalisme terjadi agar kelompok perlawanan seperti buruh tidak berafiliasi dengan kekuatan sosialis-komunis, atau pengertiannya adalah bentuk dari sebuah politik-ekonomi yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan berskala internasional seperti *Trans-national Corporation* (TNC) atau *Multi-national Corporation* (MNC), yang melihat indikasi kembalinya peran kuat negara dalam menghambat laju kehendak kapitalis dalam perdagangan, investasi dan mencari keuntungan lewat akumulasi modal.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, terlihat hubungan antara globalisasi dan neoliberalisme dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Sebagaimana dikemukakan Lafontaine, berbicara mengenai globalisasi sama artinya dengan berbicara mengenai penyebaran neoliberalisme. Sebaliknya, berbicara mengenai neoliberalisme sama artinya dengan berbicara mengenai ekspansi kepentingan para pemodal kaya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Budiman Sudjatmiko, “Mengalahkan Kapitalisme dan Neo-Liberalisme”, dalam <http://www.geocities.com/persmahasiswa/3.1.2.2.html>, diakses tgl 07 Mei 2007.

<sup>5</sup> Revrison Baswir, “Bahaya Globalisasi Neoliberal”, dalam [http://swaramuslim.net/more.php?id=1164\\_0\\_1\\_0\\_M](http://swaramuslim.net/more.php?id=1164_0_1_0_M), diakses tgl 09 Mei 2007.

Munculnya perusahaan multinasional (MNC) sebagai kekuatan nyata para pemodal kaya, menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme.<sup>6</sup>

Para pemodal kaya inilah terutama yang menjadi sponsor globalisasi. Sebab itu, mudah dimengerti bila penyebaran globalisasi hampir selalu berjalan beriringan dengan penyebaran neoliberalisme. Dengan memahami globalisasi sebagai pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal, bahaya globalisasi bagi negara-negara miskin menjadi mudah untuk dipetakan. Secara umum, globalisasi adalah sebuah proses sistematis untuk merombak struktur perekonomian negara-negara miskin, terutama berupa pengerdilan peran negara dan peningkatan peran pasar, sehingga memudahkan pengintegrasian perekonomian negara-negara miskin itu ke dalam genggaman para pemodal kaya.<sup>7</sup>

Neoliberal mengagendakan globalisasi sebagai strategi yang menghendaki adanya peningkatan peran pasar sehingga kekuasaan negara menjadi berkurang. Dalam pandangan neoliberal, dunia internasional digambarkan sedang bergerak menuju sebuah integrasi (globalisasi). Proses integrasi, yang didorong oleh kepentingan pasar bebas dan perkembangan teknologi itu dianggap telah membuat negara berada dalam posisi marginal, kehilangan otoritasnya, atau dengan kata lain tidak lagi memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam pandangan kaum neoliberal lebih melekat pada aktor-aktor lintas negara yang tidak terikat pada wilayah teritorial tertentu.

<sup>6</sup> I. Wibowo, "Pendahuluan", dalam I. Wibowo, dan Francis Wahono, (eds), "Neoliberalisme", Yogyakarta, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003, hal. 3.

<sup>7</sup> Revrisond Baswir, *loc. cit.*

Pandangan neoliberal yang “melucuti” kekuasaan negara mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satu pengkritiknya adalah Anthony Giddens yang sama-sama sebagai pendukung globalisasi. Nama Giddens mungkin tidak sepopuler dengan pemikir besar lainnya seperti Adam Smith, Karl Marx, Keynes, Max Weber dan lainnya. Namun Giddens adalah salah satu teoritikus ilmu sosial kontemporer yang populer dengan karyanya “*The Third Way*” (Jalan ketiga) yang cukup kontroversial. Bagi para pengkritiknya, “Jalan Ketiga” hanya merincikan apa-apa yang baik dan mulia. Akibatnya, “Jalan Ketiga” ini hanya bisa dipakai sebagai sebuah manifesto sebuah partai yang perlu memamerkan kegenitannya.<sup>8</sup> Memang terjadi semacam “gempa” yang ditimbulkan oleh buku “Jalan Ketiga” ini. Aliran yang sering disebut dengan “*centre-left*” ini dapat dikatakan telah mengubah wajah Eropa dan Amerika Utara. Stryker McGuire mengatakan bahwa buku Giddens itu telah menghantarkannya masuk ke kantor-kantor presiden dan perdana menteri di seluruh dunia.<sup>9</sup>

Dalam pandangan Giddens, aktor-aktor selain negara dalam globalisasi tidak begitu saja mendominasi dan “melucuti” kekuasaan negara. Dengan *bargaining power* yang dimilikinya, negara tetap memiliki peran yang signifikan dalam globalisasi. Negara memiliki otoritas, wilayah dan kekuatan militer sebagai elemen penting yang tidak dimiliki aktor lain selain negara. Dengan demikian Giddens tidak sepenuhnya dapat memeluk paham kapitalisme yang menjelma dalam neoliberalisme. Ia memperlihatkan

---

<sup>8</sup> Anthony Giddens, “*Jalan Ketiga: Pembangunan Demokrasi Sosial*” terjemahan Ketut Arva



antipatinya terhadap pemerintahan Margaret Thatcher (1979-1990) yang menurutnya menyengsarakan rakyat kecil. Namun Giddens melihat dinamisme yang tersimpan dalam kapitalisme. Di situ manusia didorong untuk kompetitif, untuk efisien dan untuk tidak bermalas-malasan.<sup>10</sup> Giddens merekomendasikan untuk melampaui Kiri (sosialisme) dan Kanan (kapitalisme), yaitu dengan merekonstruksi peran negara. Peran negara yang tidak mendominasi dan tidak didominasi oleh aktor lain dalam hubungan internasional, baik dalam politik maupun ekonomi.

#### **D. POKOK PERMASALAHAN**

Dari latar belakang masalah diatas, maka didapat sebuah pokok permasalahan : Bagaimana Kritik Anthony Giddens Terhadap Pemikiran Neoliberalisme Mengenai Posisi Negara Dalam Globalisasi?

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

##### **Globalisasi**

Globalisasi telah menyita banyak perhatian para ilmuwan sosial dan politik. Menariknya, karena begitu luasnya konsep ini digunakan, di kalangan ilmuwan tidak terdapat kata sepakat mengenai definisi yang pas mengenai globalisasi. Mereka cenderung mendefinisikan globalisasi dengan lebih menekankan aspek-aspek tertentu yang dipentingkan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. xviii.

menurut minat dan fenomena yang hendak dijelaskan, sementara pada saat yang sama cenderung mengabaikan aspek-aspek yang lain.<sup>11</sup>

Para ilmuwan terbagi menjadi tiga kelompok dalam melihat globalisasi, yakni kelompok hiperglobalis, kelompok skeptis dan kelompok transformasionalis.<sup>12</sup> Menurut para pendukung hiperglobalis, globalisasi didefinisikan sebagai sejarah baru kehidupan manusia di mana negara tradisional telah menjadi tidak relevan, lebih-lebih telah menjadi unit-unit bisnis dalam sebuah ekonomi global. Pandangan ini memberikan penekanan yang teramat besar terhadap gejala ekonomi dunia. Mereka melihat globalisasi ekonomi membawa gejala “denasionalisasi” ekonomi melalui pembentukan jaringan-jaringan produksi transnasional, perdagangan dan keuangan. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa globalisasi ekonomi tengah membangun bentuk-bentuk organisasi sosial yang tengah menggantikan negara bangsa sebagai lembaga utama dan unit politik masyarakat dunia.<sup>13</sup>

Kelompok pendukung kedua adalah kelompok skeptis. Tesis utama kelompok ini adalah globalisasi bukanlah merupakan fenomena yang sama sekali baru, tetapi mempunyai akar sejarah yang panjang. Kelompok ini menganggap bahwa tesis kaum hiperglobalis secara fundamental cacat dan secara politik adalah naif karena menganggap remeh kekuasaan kekuasaan pemerintahan nasional dalam mengatur kegiatan ekonomi

---

<sup>11</sup> Mengenai perdebatan ini dapat dilihat dalam Budi Winarno, *“Globalisasi–Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara Dalam Pembangunan”*, Yogyakarta, Tajidu Press, 2004.

<sup>12</sup> Budi Winarno, *“Globalisasi dan Krisis Demokrasi”*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2007, hal.

internasional. Sebaliknya, kelompok ini menganggap bahwa kekuatan global itu sendiri sangat bergantung pada kekuatan mengatur dari pemerintahan nasional untuk menjamin liberalisasi ekonomi terus berlanjut. Bagi sebagian besar kaum skeptis, ekonomi dewasa ini lebih didominasi “regionalisasi” karena ekonomi dunia yang dianggap mengglobal oleh kaum hiperglobalis hanya melibatkan ketiga blok perdagangan dan keuangan, yakni Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Utara.<sup>14</sup>

Kelompok ketiga adalah transformasionalis. Pandangannya adalah adanya keyakinan bahwa pada permulaan milenium baru, globalisasi adalah kekuatan utama di balik perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang telah menentukan kembali masyarakat modern dan tatanan dunia. Mereka menyatakan bahwa globalisasi yang berlangsung saat ini secara historis belum pernah terjadi sebelumnya. Pendukung transformasionalis mempunyai keyakinan bahwa globalisasi yang berlangsung dewasa ini telah menempatkan kembali fungsi dan kekuasaan pemerintahan nasional. Salah satu pandangan pentingnya adalah negara tidak lagi dapat bersembunyi dibalik klaim kedaulatan nasional. Sebaliknya kekuasaan negara bangsa saat ini dalam mengambil keputusan harus disejajarkan dengan lembaga-lembaga *governance* global dan dari sudut pandang hukum internasional.<sup>15</sup> Secara lebih radikal,

kaum neoliberal semacam Kenichi Ohmae bahkan menyatakan bahwa peran negara bangsa dalam globalisasi dewasa ini telah termarginalkan oleh adanya empat faktor. Ia menyebutnya sebagai empat “I”.

Faktor pertama adalah pasar-pasar modal di negara maju yang dibanjiri uang tunai untuk investasi. Seringkali terjadi peluang untuk investasi secara besar-besaran tidak dalam wilayah geografis yang sama dimana keuangan tersebut berada, sehingga pasar-pasar modal mengembangkan berbagai mekanisme untuk mentransfer dana keuangan tersebut melintasi batas-batas nasional. Saat ini diperkirakan 10% dana pensiun di Amerika diinvestasikan di wilayah Asia. Dengan katalisator kemajuan dibidang teknologi komunikasi, transfer investasi ditingkat global melewati batas-batas negara ini menjadi mungkin.<sup>16</sup>

“I” kedua adalah karakteristik industri dewasa ini yang memiliki orientasi lebih global daripada sepuluh tahun yang lalu.<sup>17</sup> Dalam dunia internasional kontemporer, sistem pasar terbuka yang dianut oleh kebanyakan negara saat ini memudahkan sebuah industri nasional sekalipun untuk mendirikan cabangnya di negara lain dengan perhitungan akumulasi modal yang menguntungkan.

“I” ketiga adalah teknologi informasi. Perkembangan dalam teknologi informasi juga sangat selaras dengan perkembangan dalam teknologi transportasi.<sup>18</sup> Oleh Ohmae, faktor ini dianggap sebagai faktor

---

<sup>16</sup> Budi Winarno, *“Globalisasi–Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara Dalam Pembangunan”*, Yogyakarta, Tajidu Press, 2004, hal. 46.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 47.

katalis yang paling fundamental karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah memudahkan pembentukan sebuah pasar global yang menurut kaum neoliberal sangat efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat global.

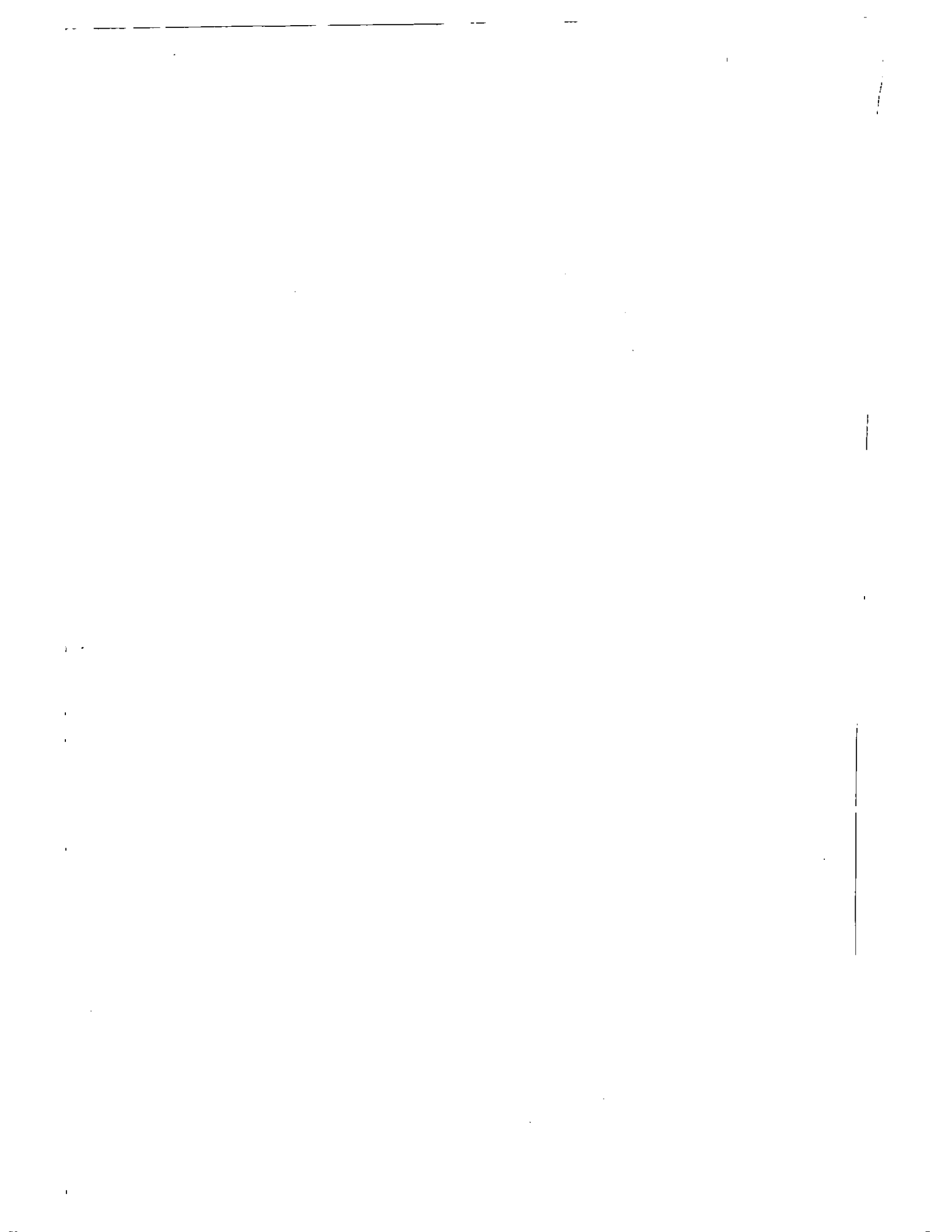
“T” Keempat adalah konsumen-konsumen individual yang orientasinya semakin mengglobal.<sup>19</sup> Karakteristik konsumen dengan selera yang mengikuti perkembangan dalam tataran global dimungkinkan dengan intensitas iklan yang hampir tak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat diberbagai belahan dunia saat ini. Singkatnya, jika ditinjau dari sudut pandang Ohmae diatas, maka terdapat sebuah gambaran mengenai terjadinya peralihan kekuasaan dari negara ke aktor-aktor lintas negara yang bergerak dalam wilayah aktifitas ekonomi politik.

Perkembangan teknologi komunikasi dan semakin murahnya biaya transportasi semakin mendorong perkembangan globalisasi, dan dengan demikian semakin mendorong terjadinya interaksi antar negara bangsa, mempercepat aliran-aliran modal global, migrasi, dan yang tak kalah pentingnya adalah pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan merujuk pada perkembangan-perkembangan ini, terutama menyangkut globalisasi, yang sering dimaknai sebagai perdagangan bebas dunia<sup>20</sup> maka pertanyaan yang layak diajukan adalah menyangkut apa yang dapat kita harapkan dari fenomena tersebut bagi penciptaan kesejahteraan negara-negara di dunia?

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 47.

<sup>20</sup> Sindhuwata, “Dilema Globalisasi”, *Basis*, No. 01/02, Tahun ke-52, Januari-Februari 2002



Bagi kalangan yang sangat optimis terhadap globalisasi, seperti Thomas L. Friedman dan beberapa penulis yang lain, globalisasi adalah satu-satunya jalan yang dapat digunakan umat manusia untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Runtuhnya berbagai sistem ekonomi yang menjadi “*rival*” kapitalisme telah meyakinkan sebagian kelompok ini bahwa globalisasi dan liberalisasi pasar telah menawarkan alternatif bagi pencapaian standar hidup yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih baik, dan efisiensi ekonomi,<sup>21</sup> sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh sosialisme maupun komunisme. Namun demikian, pandangan-pandangan dari kelompok ini tidak dapat memberi penjelasan yang cukup memadai mengenai semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antara-antara negara kaya dengan negara-negara miskin. Pandangan seperti yang dikemukakan Friedman mengenai globalisasi dan pasar bebas tidak dapat menjelaskan bahwa seiring dengan globalisasi, pendapatan di negara-negara Dunia Ketiga jauh lebih menurun dibandingkan dengan era tahun 1960-an dan 1970-an.<sup>22</sup>

Sementara itu, Giddens membagi globalisasi menjadi empat dimensi, yaitu ; ekonomi kapitalis dunia, sistem negara bangsa, tatanan militer dunia dan pembagian kerja internasional. Berdasarkan Dimensi Globalisasi Giddens tersebut, pusat-pusat utama kekuasaan dalam ekonomi dunia adalah negara-negara kapitalis, dimana perusahaan

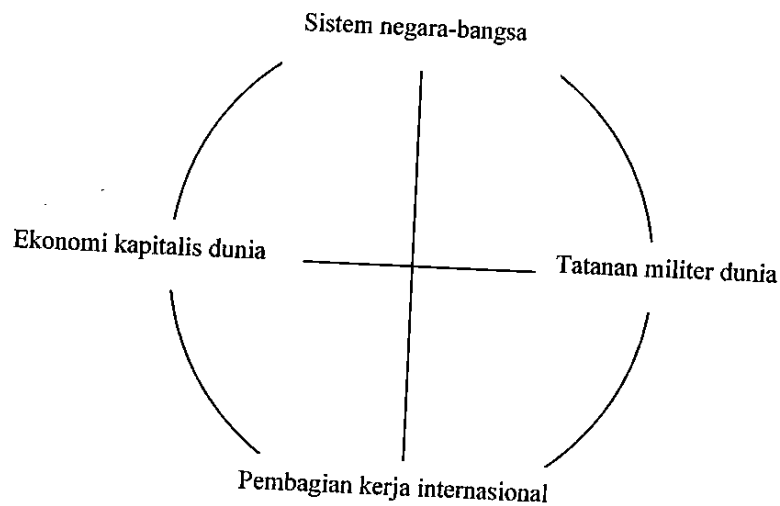
---

<sup>21</sup> Budi Winarno, “*Globalisasi – Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara Dalam Pembangunan*”

ekonomi kapitalis (dengan relasi kelas yang ditimbulkannya) menjadi bentuk utama produksi.<sup>23</sup>

### Gambar 1

#### Empat Dimensi Globalisasi menurut Anthony Giddens<sup>24</sup>



Perusahaan bisnis, khususnya korporasi transnasional dapat mencengkeram kekuatan ekonomi dan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan politik di markas mereka dan di berbagai tempat. Perusahaan transnasional besar kini memiliki anggaran yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh beberapa negara. Namun terdapat beberapa hal pokok dimana kekuasaan mereka tidak dapat menyaingi negara, yaitu faktor teritorialitas dan kontrol sarana militer. Tidak ada wilayah di muka

<sup>23</sup> Anthony Giddens, "Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas", terjemahan Nurhadi, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, hal. 92.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 93.



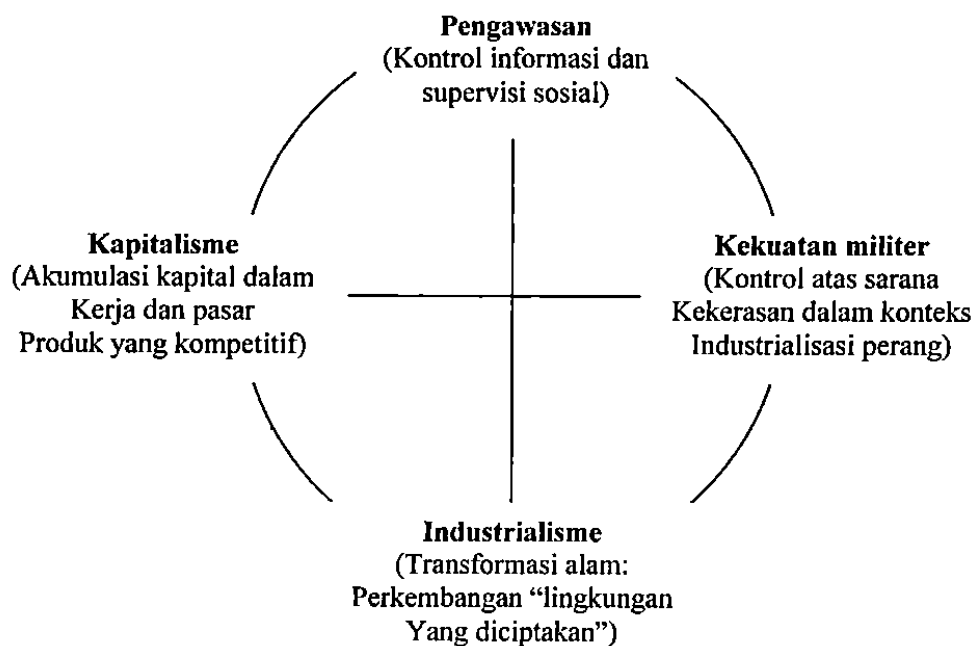
bumi ini, dengan pengecualian parsial kawasan kutub, yang tidak diklaim sebagai ranah kontrol sah satu negara atau negara lain.<sup>25</sup>

### **Dimensi Institusional Modernitas**

Dalam pemikiran Giddens, dunia sekarang harus dipikirkan sebagai resultante dari empat gugus institusi: kapitalisme, industrialisme, pengawasan (*surveillance*) dan kekuatan militer.<sup>26</sup>

### **Gambar 2**

#### **Dimensi Institusional Modernitas menurut Anthony Giddens<sup>27</sup>**



Mulai dari sisi lingkaran, kapitalisme melibatkan pemisahan ekonomi dari politik melawan latar belakang kerja dan pasar produk yang kompetitif. Pengawasan, pada gilirannya adalah sesuatu yang fundamental

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>26</sup> Anthony Giddens, "*Jalan Ketiga; Pembaruan Demokrasi Sosial*", terjemahan Ketut Arya Mahardika, Jakarta, Gramedia, 2002, hal. xii.

bagi semua jenis organisasi yang terkait dengan kemunculan modernitas, khususnya negara-bangsa, yang secara historis memiliki hubungan timbal balik dengan kapitalisme dalam perkembangannya. Ada hubungan substantif yang cukup dekat antara operasi pengawasan oleh negara-bangsa dengan perubahan sifat kekuasaan militer pada zaman modern.

Bergerak lagi mengitari lingkaran itu, ada hubungan langsung antara kekuatan militer dengan industrialisme, suatu ekspresi utama dari industrialisasi perang. Mirip dengan hal tersebut, kaitan jelas bisa dibangun antara industrialisme dengan kapitalisme. Industrialisme menjadi poros utama interaksi manusia dengan alam dalam berbagai kondisi modernitas. Pada sebagian besar budaya pramoden, manusia sebagian besar melihat diri mereka sendiri sebagai kelanjutan dari alam. Hidup mereka terikat pada polah dan tingkah lingkungan, ketersediaan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup, budi daya dan pemetikan hasil panen dan binatang ternak, dan dampak dari bencana alam. Industri modern, yang dibangun oleh aliansi ilmu dan teknologi, mentransformasikan alam dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Pada sektor industri di seluruh dunia, manusia hidup dalam *lingkungan yang diciptakan*, suatu lingkungan tindakan yang tentu saja bersifat fisik namun tidak lagi alamiah. Bukan hanya lingkungan yang dibangun di kawasan perkotaan namun juga landscape lain pun ikut dikoordinasikan dan dikontrol manusia.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 80.

### **Time-Space Distanciation**

Hubungan waktu dan ruang dalam pandangan Giddens menunjukkan gejala bahwa waktu dan ruang menentukan makna tindakan, maupun perbedaan nama tindakan yang satu dari yang lain. Sesuatu tidak hanya berada dalam waktu dan ruang, waktu dan ruang membentuk makna dari sesuatu tersebut. Hubungan keduanya bersifat kodrati dan menyangkut makna dan hakekat tindakan itu sendiri. Lugasnya, tanpa waktu dan ruang, tidak ada tindakan. Kegiatan duduk melihat gambar pada layar di gedung bioskop (ruang), misalnya, umumnya tidak disebut bekerja, sebagaimana berada di samping mesin pencetak pil dalam sebuah pabrik (ruang) dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore (waktu) umumnya tidak disebut berlibur. Demikian pula mendengarkan guru atau dosen berbicara di kelas (ruang) pada jam tertentu (waktu) umumnya disebut be-sekolah atau ber-kuliah.

Giddens mengajukan argumen bahwa koordinasi waktu dan ruang merupakan faktor yang lebih sentral bagi keberadaan hidup masyarakat dibanding cara produksi sebagaimana diajukan oleh Karl Marx. Apa yang terjadi dalam globalisasi adalah gejala pencabutan waktu-eksistensial (*existential time*) menjadi waktu kosong (*empty time*) yang bisa ditukar dan diperdagangkan, sehingga muncul perbedaan antara waktu kerja dan waktu senggang, jam kerja dan jam makan, waktu resmi dan waktu pribadi, tempat kerja dan tempat istirahat, kerja dan istirahat.<sup>29</sup> Pembagian waktu tersebut kemudian berkembang dan melahirkan teknologi yang terus

menerus berkembang dan menjadi faktor penting bagi perkembangan kapitalisme.

Semua tindakan hanya berlangsung *dalam* (bukan *melalui*) waktu dan ruang. Tetapi soal bagaimana hubungan waktu dan ruang dikoordinasi dalam praktik sosial merupakan faktor yang membedakan masyarakat modern dari masyarakat sebelumnya. Seorang di Jakarta yang menghubungi saudaranya di Surakarta pada tahun 1750 membutuhkan waktu paling cepat seminggu atau sebulan untuk dapat menemuinya. Ia harus datang atau mengirim utusan atau datang sendiri ke Surakarta. 'Waktu' ketika bertemu tidak bisa dipisahkan dari 'tempat' di mana ia bertemu saudaranya.

Dengan demikian, 'kapan' (waktu) harus bersatu dengan 'di mana' (tempat). Seorang yang melakukan hal yang sama di tahun 2000 tidak perlu datang ke Surakarta, dan hanya butuh sekian detik untuk menekan nomor telepon (atau paling lama semalam naik kereta api). 'Kapan' (*when*) dicabut dari 'dimana' (*where*). Giddens menyebut gejala ini sebagai 'perentangan waktu dan ruang' (*time-space distanciation*), yang berisi pencabutan waktu dari ruang. Pencabutan waktu dari ruang inilah yang menjadi perbedaan antara masyarakat modern dan masyarakat sebelum modern. Dapat dikatakan, "masyarakat adalah pelintas waktu." Berdasarkan perbedaan koordinasi waktu dan ruang, Giddens mengajukan tipologi tiga bentuk masyarakat dalam sejarah.

Gambar 3

**Tipologi Tiga Bentuk Masyarakat Dalam Sejarah Menurut**

**Anthony Giddens<sup>30</sup>**

<i>Tribal Society</i>	<i>Class-divided Society</i>	<i>Capitalism (Class Society)</i>
<b>Prinsip Strukturasi:</b> Adat Tradisi Pertemuan-muka	<b>Prinsip Strukturasi:</b> Simbiosis Kota dan Pedalaman	<b>Prinsip Strukturasi:</b> Negara-Bangsa <i>Surveillance</i> Pemisahan Ekonomi Dan Politik
←	Perentangan Waktu-Ruang	→
RENDAH		TINGGI

Berdasarkan tipologi tiga bentuk masyarakat di atas, inovasi teknologi transportasi dan teknologi informasi menjadi faktor yang sangat penting dalam koordinasi waktu dan ruang yang membentuk masyarakat kapitalis. Kemampuan teknologi memungkinkan terjadinya “pencabutan” waktu dari ruang yang mengalami transformasi dalam praktik sosial dan menimbulkan adanya mekanisme rekayasa dalam kehidupan modern. Apa yang dahulu kita anggap sebagai bahaya alami (*external risk*) semakin berubah menjadi resiko buatan (*manufactured risk*). Gejala banjir, pemanasan bumi, perusakan lapisan ozon, polusi, bahaya pestisida, sampai pada radiasi layar komputer tidak bisa lagi disebut sebagai gejala yang sepenuhnya disebabkan oleh alam. Tetapi ada contoh lain yang lebih

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 39.

menakutkan daripada perusakan alam, yaitu senjata nuklir yang mempunyai kapasitas merusak yang sangat besar.

Dari model pemikiran Giddens yang dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa Giddens termasuk dalam kelompok orang yang pesimis, bahwa dunia saat ini berjalan tanpa kepastian dan penuh resiko. Pandangan neoliberal yang mengatakan bahwa pasar bebas akan berbanding lurus dengan kemajuan perekonomian suatu negara tidak sepenuhnya dapat terjadi. Di satu sisi, pasar bebas menghendaki perlucutan kekuasaan negara sampai pada batas yang paling minimum. Dengan kata lain, negara tidak lagi memiliki kekuasaan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun disisi lain, pasar bebas tetap membutuhkan kekuatan militer yang dimiliki negara untuk menjaga stabilitas transaksi dalam pasar bebas. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya, negara memiliki kapasitas untuk melakukan *surveillance* (pengawasan) terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh warganya. Dengan demikian, negara tetap memiliki kekuasaan yang berguna untuk mengendalikan kerakusan para kapitalis, tetapi tidak boleh sedemikian besar sehingga melumpuhkan minat investor. Industrialisme perlu untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih efektif dan efisien, tetapi tetap memperhatikan faktor resiko yang ditimbulkan.

### **Teori Strukturasi**

Dalam *Teori Strukturasi*-nya, Giddens menjelaskan hubungan antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*), serta sentralitas ruang (*space*) dan waktu (*time*). Yang disebut pelaku adalah orang-orang yang

konkret dalam “arus berkelanjutan sebuah tindakan dan peristiwa di dunia.” Sedangkan struktur adalah “aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial.”<sup>31</sup>

Giddens menjelaskan dua masalah mendasar dalam *Teori Strukturasi*-nya. Pertama, hubungan pelaku dan struktur itu berupa dualitas (timbang balik) bukan dualisme (tegangan atau pertentangan). Ia melihat bahwa ilmu-ilmu sosial dijajah oleh gagasan dualisme (*dualism*) pelaku *versus* struktur. Misalnya dalam pemikiran Karl Marx yang mengatakan bahwa kelas proletar (pelaku) akan selalu bertentangan dengan kapitalisme (struktur). Giddens memproklamirkan hubungan keduanya sebagai relasi dualitas (*duality*) : “tindakan dan struktur saling mengandaikan.” Dualitas antara pelaku dan struktur terletak dalam proses dimana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Kedua, sentralisasi waktu dan ruang biasanya dipahami sebagai arena atau panggung tindakan (*stage*), kemana kita masuk, darimana kita keluar.

Diilhami oleh filsafat waktu Martin Heidegger, Giddens menyatakan bahwa waktu dan ruang bukanlah arena atau panggung tindakan, melainkan unsur konstitutif tindakan pengorganisasian masyarakat. Artinya, tanpa waktu dan ruang, tidak ada tindakan. Karena itu

---

<sup>31</sup> B. Herry dan Priyono, “Anthony Giddens Suatu Pengantar”, Jakarta: KPG, 2003, hal. 19.

waktu dan ruang harus menjadi unsur integral dalam teori ilmu-ilmu sosial.<sup>32</sup>

Berbeda dengan pandangan neoliberal yang mengatakan bahwa negara harus digantikan perannya oleh pasar bebas untuk kemajuan perekonomian. Pandangan neoliberal tersebut menunjukkan bahwa peran negara hanya akan menghambat kemajuan perekonomian. Sehingga terjadi hubungan dualisme / pertentangan antara negara dan pasar bebas. Dalam pandangan Giddens, hubungan yang terjadi antara negara dan pasar bebas adalah hubungan dualitas / saling mengandaikan antara pelaku dan struktur. Pasar bebas adalah struktur yang merupakan hasil dan sekaligus sarana interaksi antar pelaku, yaitu negara. Pasar bebas merupakan sebuah kesepakatan antar negara yang menjadi suatu 'kebiasaan mirip pedoman'. 'Kebiasaan mirip pedoman' tersebut kemudian menjadi sarana (*medium*) dan sumberdaya (*resources*) bagi berlangsungnya praktik sosial, termasuk dalam hubungan internasional.

Dalam konteks sekarang ini, setahap demi setahap negara-negara di dunia mulai menerima dan menerapkan pasar bebas dalam melakukan aktivitas perekonomian. Hal inilah yang disebut struktur oleh Giddens sebagai sarana sekaligus sumberdaya yang memberdayakan pelaku (negara). Struktur dalam pandangan Giddens bukanlah benda, melainkan tindakan yang menjadi sebuah kebiasaan yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial, baik dalam ekonomi maupun politik internasional



## **F. HIPOTESIS**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar teori diatas, maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut:

1. Giddens mengkritik pandangan neoliberalisme tentang hubungan dualisme (pertentangan) antara pasar bebas dan negara. Hubungan yang terjadi adalah dualitas (timbang-balik) pelaku dan struktur. Pasar bebas sebagai struktur merupakan hasil dan sekaligus sarana penting bagi interaksi ekonomi antar negara sebagai pelaku.
2. Dalam pandangan Giddens, globalisasi tidak begitu saja melucuti kekuasaan negara karena negara tetap memiliki wilayah dan kemampuan melakukan pengawasan serta kontrol terhadap sarana militer yang tidak dimiliki aktor lain dalam hubungan internasional.

## **G. BATASAN PERMASALAHAN**

Dalam melakukan setiap penelitian sangat diperlukan penetapan pembatasan topik penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian yang disusun bisa lebih fokus dan mengarah pada sasaran objek permasalahan. Dalam skripsi ini penulis akan membatasi permasalahan pada deskripsi kekuasaan negara dalam globalisasi dan era sebelumnya serta membandingkannya dengan pemikiran neoliberalisme dan Anthony Giddens sebagai salah satu pemikir besar dalam teori sosial kontemporer.

## H. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui penelusuran Guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di atas, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney,<sup>33</sup> penelitian deskriptif ialah penelitian tentang fakta dengan interpretasi yang tepat bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.

### 2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik. Karena sudah di peroleh dari tangan ke dua, ketiga, dan seterusnya. Melihat dari uraian itu maka yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku-buku, teks, jurnal ilmiah, arsip-arsip atau berita-berita di surat kabar majalah dan internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data sekunder, dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi melalui studi kepustakaan (*library research*). Sesuai dengan penggunaan data sekunder, maka pencarian data

---

<sup>33</sup> Whitney, dalam Moh Natsir, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

penelitian dari penulisan ini di fokuskan pada data-data pustaka, yaitu dengan menggumpulkan, menyeleksi, menganalisis bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah dan sebagainya.

#### 4. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh dari penelitian ini akan di susun secara sistematis dan logis kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor<sup>34</sup> berpendapat penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau bisa dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam empat bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### BAB. I

Merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>34</sup> Bogdan dan Taylor, dalam Lery: J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", PT Remaja

## BAB II

Bab ini akan menguraikan sejarah dan perkembangan neoliberalisme, yang dimulai dari liberalisme dan pasar bebas, kapitalisme dan faktor pendorong munculnya neoliberalisme, karakteristik neoliberalisme, pasar bebas dan runtuhnya kedaulatan negara bangsa.

## BAB III

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai biografi singkat Anthony Giddens, neoliberal dalam dialektika ruang dan waktu, hubungan dualitas negara dan pasar bebas, posisi negara dan pasar bebas dalam neoliberalisme : studi kasus pertumbuhan ekonomi China dan Amerika Serikat.

## BAB IV

Bab ini menjadi penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan, yaitu poin-poin penting yang dapat dijadikan acuan.